

# Merajut Manajemen Negara dalam Bingkai Nasionalisme Humanis

*Sabiqul Khair Syarif*

*Up to now, the discourse of the Indonesian nationalism development is still going on. Debates and questions on this issue tend to show that the birth of Indonesia was based on the porous nationalism. It was accumulated with the emerging several centrifugal conflicts in this country triggered by the issues of religions, ethnic, etc like what had taken place in Ambon, Sampit, Sambas, and Aceh. This paper discusses the concept of dynamic nationalism that should be earthed through the dialectic process from time to time. Models of repressive ideologies and political mobilization must be eliminated. For example, the collapse of Soviet Union and Yugoslavia were lesson that could be learned from this issue. The future face of the Indonesian nationalism should be based on the human right without any forces, violence, exploitation, and suppression.*

**Kata kunci:** *diskursus, nasionalisme, konflik, ideologi represif*

Diskursus perjalanan Nasionalisme Indonesia hingga kini masih terus bergulir, sehingga tidak jarang menjadi perdebatan dan pertanyaan yang cenderung curiga bahkan menuding, bahwa Indonesia dilahirkan dari rahim nasionalisme yang keropos dan cenderung dipaksakan. Hal ini terakumulasi dengan merebaknya konflik sentrifugal dengan pemicu bumbu agama, superioritas etnis dan pelbagai sebab lainnya. Fenomena kekerasan di Ambon, Sambas, Aceh, Sampit misalnya, semakin menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia di bangun diatas pondasi yang keropos dan kering akan nilai persatuan senasib dan sepenanggungan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang nasionalisme sebagai model alternatif strategis dalam membangun manajemen negara. Ada baiknya kita membuka wacana tentang negara.

Negara pada awalnya diciptakan jelas guna melayani kepentingan masyarakat. Pun dalam proses perjalanannya kalau ada peraturan atau kebijakan yang *jomplang* tinggal diganti saja, sehingga masalah atau keluhan masyarakat dapat diakomodasi secara baik dan masalahpun selesai. Tapi, apakah sesederhana itu?. Negara adalah suatu benda yang memiliki kompleksitas masalah yang kemudian dapat melakukan praktik "perkosaan" terhadap hak warga dan melakukan malpraktek penyelenggaraan negara. Di Indonesia, ada pendapat kuat yang beranggapan bahwa negara merupakan sebuah lembaga yang netral, tidak berpihak berdiri diatas semua golongan masyarakat dan mengabdikan pada kepentingan umum. Ideologi *negara netral* dan *berdiri sendiri di atas semua golongan* merupakan ideologi yang ampuh bagi keabsahan berkuasanya sebuah negara. Keabsahan ini sangat perlu, karena kekuasaan yang

diberikan pada negara sangatlah besar.<sup>1</sup> Negara memiliki kekuasaan untuk mengikat warganya dan memaksakan kehendaknya melalui jalur kekerasan yang dijastifikasi oleh hukum. Segala peraturan yang dibuat oleh negara mau tidak mau harus dilaksanakan karena kalau tidak akan dianggap subversif, perorong, mengancam nasionalisme dan pembangkang. Hal ini sejalan yang didefinisikan oleh Max Weber bahwa negara sebagai "lembaga kemasyarakatan berhasil memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik di suatu daerah tertentu".<sup>2</sup> Artinya legalitas kekuasaan hukum hanya dimiliki oleh negara selain dari padanya tidak memiliki otoritas sedikitpun untuk melakukan monopoli kebenaran dalam sebuah negara.

Dalam konteks Indonesia pandangan yang cenderung dominan adalah bahwa negara memiliki kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, negara dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang lebih kecil jumlahnya.<sup>3</sup> Walaupun negara tidak berpihak pada kepentingan umum, hal ini dianggap sebagai abnormal yang harus diperbaiki. Padahal mungkin negara "menyelaweng" alias berpihak pada kelompok tertentu yang menguntungkan secara materil dan untuk dalih menjaga wibawa negara dan kepentingan rakyat. Keberpihakan negara kepada suatu kelompok tertentu adalah sesuatu yang normal. Artinya negara yang netral dan tidak berpihak serta bergerak dan bekerja atas nama kepentingan umum adalah sesuatu yang utopis dan mimpi.<sup>4</sup>

Berbicara negara pasti tidak lepas dengan apa yang disebut dengan

kekuasaan. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa kekuasaan yang besar pada negara merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan menjadi liar, tak dapat dikendalikan, bila negara tidak memiliki kekuasaan yang besar. Negara harus menjinakkan mereka dan mengajarkan nilai-nilai moral yang rasional. Karenanya negara yang ideal menurut Plato adalah negara yang tidak mengandung ketidak-adilan terhadap manusia.<sup>5</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh Plato ini disatu sisi ada benarnya, karena kalau negara tidak ikut campur dalam mengatur masyarakat, maka akan terjadi konflik dan kericuhan sosial yang berujung pada lahirnya praktik dehumanisasi. Tapi, disisi lain kalau kekuasaan negara tidak dikawal, diperhatikan dan diawasi maka, negara bisa jadi akan melakukan malpraktek dalam penyelenggaraan negara yang ujung-ujungnya akan menguntungkan pihak-pihak penyelenggara negara itu sendiri. Negara kerap kali cenderung pongah dan sombong tatkala tidak ada yang melakukan *check and balances* dari masyarakatnya. Karenanya, perlu dibangun dialektika politik masyarakat yang produktif yang nantinya dapat menjadi konsesi segenap kepentingan masyarakat yang kemudian mengerucut menjadi kepentingan bersama atas nama negara. Pun demikian dalam proses perjalanannya harus diramu talenta kekritisian masyarakat dalam menelisik pelbagai fenomena sosial dalam kehidupan

<sup>1</sup> Arief Budiman, 2002. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia. hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, lebih jelasnya lihat Gerth dan Mills, 1962:78

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>5</sup> *Ibid*. hlm. 8

masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Demokrasi sebagai media yang strategis dalam mengapresiasi pelbagai macam persoalan politik masyarakat. Dengan demokrasi pemerintahan konstitusional mampu mengekang atau membatasi dan membagi kekuasaan mayoritas dan sekaligus dapat melindungi kebebasan individu<sup>6</sup>. Bagaimanapun negara lahir dari racikan kepentingan yang mengatasmakan kontrak politik yang muncul dari dialektika yang intensif dan radikal dari setiap anggota masyarakat. Sejatinya secara alamiah negara juga memiliki hak, begitu juga dengan masyarakat itu sendiri. Dimana kebebasan masyarakat dihargai dan dijaga oleh negara guna mengusung keranda keadilan, moralitas dan martabat kemanusiaan yang sejati.

Dalam ranah masyarakat, konsolidasi demokrasi juga harus dilakukan guna akselerasi proses pendidikan politik yang massif dalam mengantisipasi lahirnya otoritarianisme negara. Sudah cukup pengalaman pahit dimana masyarakat Indonesia dipecundangi oleh Soeharto pada zaman orde baru. Konsolidasi, dalam kaca mata Laurence Whitehead, mencakup peningkatan komitmen masyarakat dalam mengikuti aturan main demokrasi<sup>7</sup>. Menurut Linz dan Stepan (1996), ada lima arena yang harus memiliki garis demarkasi yang simultan dalam upaya konsolidasi demokrasi. *Pertama*, masyarakat politik yang relatif mandiri dan bermakna. *Kedua*, tumbuhnya kehidupan masyarakat sipil yang bebas, mandiri dan semarak. *Ketiga*, birokrasi negara yang bersih serta memiliki akuntabilitas pelayanan yang memadai oleh pemerintahan demokrasi yang baru. *Keempat*, harus ada *rule of law* yang memberikan jaminan legal bagi kebebasan

warga negara dan tumbuhnya asosional independen. *Kelima*, institusionalisasi masyarakat ekonomi, artinya harus ada norma, institusi dan regulasi yang diterima sebagai jembatan antara negara dan pasar.<sup>8</sup>

Tingkah polah penyelenggara negara beberapa dasawarsa belakangan ini cenderung kurang santun, bertanggung jawab, rasional dan humanis. Ini terbukti dengan manajemen negara pada rezim Soeharto sangatlah kejam dan mengungkung, serta sekaligus meringkus kreativitas anak negeri dan masyarakat untuk maju. Proses penggerusan hak-hak rakyat atas nama kepentingan negara dan stabilitas persatuan semakin hari semakin mengurita. Pemantikan kekuasaan dalam segala lini kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang harus diikuti dan diapresiasi secara baik oleh setiap masyarakat karena kalau tidak stigma subversif akan diberikan dan penjara sudah menanti. Kepatuhan semu telah memberangus segala hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kenyataan pahit telah dirasakan bangsa ini dimana rezim orde baru mencengkeramkan kukunya kurang lebih 32 tahun. Untuk memperbaiki keadaan, seperti itu perlu radikalisasi dan produktifikasi budaya kritik terhadap pemimpin sehingga masifitas penyemaian budaya kritik yang berpijak pada dasar moralitas, rasional dan kebenaran dapat diproduksi secara baik. Kondisi bangsa ini tengah berada dalam kegentingan yang

<sup>6</sup> AAGN Dwipayana, 2005. *Demokrasi*. Materi kuliah Teori Politik Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah. UGM. Tidak diterbitkan.

<sup>7</sup> Larry Diamond, 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press. Yogyakarta. Dalam pengantarannya oleh Sutoro Eko. hlm xix

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. xx

memaksa mulai dari krisis politik, ekonomi, hukum, korupsi dan praktik eksploitasi yang tidak manusiawi, sehingga anyaman semangat nasionalisme yang cenderung sektarian harus direformulasi ulang menjadi rajutan nasionalisme yang integralistik dan humanis.

### Nasionalisme Sebuah Konsep yang Menakjubkan

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling mutakhir dan menajubkan dalam sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satupun ruang sosial di muka bumi ini yang tidak lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Sebagai konsep sosial, nasionalisme tidak muncul begitu saja tanpa ada proses evolusi makna melalui media bahasa. Dalam studi semantik Guido Zematto (1944), kata *nation* berasal dari kata latin yang berakar pada kata *nascor* yang berarti "saya lahir".<sup>9</sup> Dalam proses perjalanannya kata *nasion* mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblee nazionale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter dimana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. Dari sinilah makna *nation* menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.<sup>10</sup>

Sebagian kalangan melihat garis singgung yang dominan dari nasionalisme adalah berangkat dari faktor budaya atau dapat kita sepadankan dengan perspektif

etnonasionalisme yang melihat nasionalisme berdasarkan hubungan kekerabatan dan kesamaan budaya.<sup>11</sup> Tapi, dalam perspektif Indonesia nasionalisme cenderung dibangun atas rasa 'kepedulian senasib'. Ini terbukti lahirnya semangat kesadaran kebersamaan dari kaum intelektual pemuda pribumi pentingnya persatuan, menjadi penyulut untuk menyatukan semangat kebangsaan dalam bingkai semangat persatuan. Fenomena lahirnya semangat kebersamaan untuk merdeka dari kolonialisme merupakan salah satu ekpresi cermin dari nasionalisme tahap pertama. Namun nasionalisme pertama yang bergerak pada ranah kemerdekaan politik belum memadai karena belum dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi yang merupakan sebuah konsekuensi logis dari situasi globalisasi dan interpedensi. Untuk itu nasionalisme Indonesia harus cerdas dalam mengapresiasi segala macam persoalan bangsa mulai dari masalah politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Konsesi nasionalisme awal telah dirilis oleh peristiwa Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah pemuda 1928. Episode ini mempertontonkan gairah revolusi dan semangat pembelaan tanah air yang dahsyat. Episode inipun menjadi cerita sukses pemancangan dasar keindonesiaan. Sukses pemancangan dasar keindonesiaan itu ditopang oleh besarnya "kesetiaan nasional" sehingga membentuk apa yang disebut oleh Ben Anderson (1983) sebagai *the imagined communities* di dada setiap pelaku revolusi. Kesetiaan nasional diposisikan pada tempat paling tinggi mengatasi kesetiaan-kesetiaan primordial

<sup>9</sup> Sulfikar Amir, *Epistemologi Nasionalisme*, Kompas, 03 November 2004

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

dan subnasional. Terbentuklah "elan revolusi" yang diisi oleh roh dan semangat egalitarianisme, konsensus moral, semangat kebersamaan dan kemitraan, serta otonomi partisipasi.<sup>12</sup>

Nasionalisme menurut Herder Nasionalisme adalah upaya pengikatan diri pada " arus tradisi ". Kesetiaan pada sebuah wilayah, bahasa, sejarah, religiusitas, atau agama. Ini adalah awal nasionalisme. Nasionalisme adalah kesetiaan pada segala sesuatu yang bersifat " lokal ", " tradisional ", dan karenanya sempit.<sup>13</sup> Kalau menurut Hans Khon dalam *the Idea of Nationalism* menggagaskan nasionalisme sebagai loyalitas pada negara nasional, maka masuklah wacana nasionalisme pada tahap pencerahan. Nasionalisme mewujudkan menjadi gairah membentuk kebersamaan dan integrasi di dalam keragaman. Konsep *Nation-State* (negara-bangsa) pun diperkenalkan sebagai entitas yang memadahi nasionalisme semacam itu. *Nation - State* merupakan pola organisasi politik yang paling afdol<sup>14</sup> dalam dekade dewasa ini dan masa depan.

Munculnya negara seringkali dikaitkan dengan munculnya suatu bangsa sehingga dikenal dengan " Negara dan Bangsa ". Akan tetapi ada dua macam teori mengenai munculnya suatu bangsa dan perbedaan ini menggambarkan dengan jelas tentang "kepribadian bangsa" dan "kepribadian nasional". Teori pertama mengajarkan bahwa suatu bangsa muncul dari kesadaran kolektif yang berkembang dari " dalam ", artinya jika manusia menyadari bahwa kesatuan, kesamaan, kebersamaan, dalam ras, bahasa dan ikatan sejarah. Kesadaran ini akan membawa pada kesadaran " identitas " bersama. Ini adalah sesuatu yang kodrati dan alami.

Teori kedua munculnya suatu bangsa dibentuk dari luar dengan suatu ideologi.

Ideologi ini menggerakkan dan mengangkat kelompok manusia dari berbagai macam ras agama dan bahasa. Untuk bersama-sama membentuk negara dengan tuntutan kesetiaan dari orang-orangnya.<sup>15</sup> Artinya jelas bahwa lahirnya Indonesia adalah merupakan proses dari desakan internal untuk menopang atau melindungi kepentingan mendesak dari arogansi kolonialisme belanda, sehingga mau tidak mau negara dibentuk dalam bingkai anyaman nasionalisme.

Nasionalisme jelas erat kaitannya dengan sejarah. Sebab tanpa sejarah kita tidak tahu diri kita ini siapa. Rajutan kesadaran pribadi sebuah nasionalisme harus berporos pada pengetahuan tentang sejarah. Nasionalisme tanpa sejarah itu namanya *emosi bodoh*. Nasionalisme harus disinari oleh kesadaran, pengertian dan pengetahuan dan kesadaran sejarah.<sup>16</sup> Dalam konteks ini konstruksi keindonesiaan harus dipahami sebagai mata rantai yang tak dapat diputuskan dan diceraiberaikan oleh gemericik kepentingan-kepentingan pragmatis yang cenderung menjebak masyarakat pada ego sektoral yang berlebihan.

Pada konteks kekinian wacana kebangsaan yang sekarang ini didengungkan serasa tidak tepat karena menunjuk entitas Indonesia yang majemuk dan multi bangsa. Terminologi "keindonesiaan" untuk mewakili entitas itu lebih jauh lebih pas.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Eep Saifullah Fatah, 1999. *Membangun Oposisi, Agenda-agenda Perubahan Politik Masa Depan*. Bandung. Rosda Bandung . hlm. 166

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Soejatmoko, 1991. *Nasionalisme sebagai Prospek Belajar, Prisma* No. 2 Tahun XX Februari. LP3ES. Jakarta. hlm. 31

<sup>15</sup> *Ibid*. Hal.32

<sup>16</sup> Soedjatmoko, *op.cit*. hlm. 30

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 165

Karena rasa persatuan sebagai bangsa yang besar dalam bingkai keindonesiaan merupakan identitas nasionalisme yang mengusung semangat solidaritas, egalitarianisme dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Pola-pola pembentukan sumber mata air kebajikan hidup yang bermuara pada konflik yang tidak rasional akan mencederai kesadaran sejarah, bahwa Indonesia lahir dari dialektika kesadaran yang berliku-liku dan membutuhkan perjuangan dalam menggerakkan revolusi kemerdekaan.

Terlepas dari perdebatan antara George Mc Turnan Kahin dan Benedict Anderson tentang siapa yang paling berperan menggerakkan revolusi, episode revolusi kemerdekaan mempertontonkan pula secara tegas betapa keberadaan "persoalan bersama" amat penting dalam membentuk kesetiaan nasional. Para pelaku sejarah masa itu berhasil mendefinisikan secara konkret dan mengkonsensuskan secara moral persoalan bersama negara bangsa Indonesia: Kebebasan, Kedaulatan, harga diri dan kemerdekaan nasional.

### Membumikan Nasionalisme

Nasionalisme bukanlah sesuatu yang statis. Ia produk dialektika sejarah yang tak pernah berhenti. Jika kita sepakat dengan Machiavelli ketika ia mengatakan bahwa "sebuah perubahan adalah awal dari perubahan berikutnya", maka nasionalisme tak akan pernah berhenti berubah. Definisi nasionalisme tak bisa dibuat sekali untuk selamanya; selalu berubah sejalan dengan perubahan itu sendiri<sup>18</sup>. Oleh karenanya bangunan nasionalisme itu terus hidup dan mengalir sesuai dengan kondisi sosio-politik, ekonomi dan kultural masyarakat setempat.

Potret lahirnya desentralisasi dalam wujud otonomi daerah apakah kemudian akan memperkuat lahirnya semangat lokalisme dalam bingkai nasionalisme daerah yang *vis a vis* pemerintah pusat?. Radikalisasi nasionalisme lokal ini dapat dilihat dari lahirnya gerakan-gerakan seperti, Aceh, Papua dan Maluku. Ditambah lagi dengan teror bom yang dilakukan oleh teroris semakin membumbui mencekamnya patriotisme lokal. Di samping itu panggung politik nasional selama ini hanya menampilkan paket perangkat demokrasi "cepat saji" dengan banyaknya produk undang-undang yang tidak akomodatif dan responsif terhadap persoalan masyarakat yang sejatinya bertentangan dengan tuntutan riil demokrasi.<sup>19</sup> Proses ini sebenarnya telah mencederai semangat demokrasi dan nasionalisme humanis. Tapi, bagaimanapun proses dialektika ini harus dikawal dalam bingkai negara kesatuan. Artinya diversifikasi terhadap nasionalisme yang dipilah-pilah menjadi nasionalisme politik, nasionalisme ekonomi dan nasionalisme kebudayaan<sup>20</sup> jangan sampai terjadi, karena nasionalisme Indonesia yang cerdas adalah nasionalisme yang integralistik.

Upaya membumikan dan merekayasa masa depan Indonesia perlu mengapresiasi pendapat yang dikemukakan oleh Eep Saifullah Fatah (1999): *Pertama*, model-model represi ideologis dan mobilisasi politik

<sup>18</sup> Eep Saifullah Fatah, *op. cit.* hlm. 178

<sup>19</sup> Y. Ari Nurcahyo. 2004. *Pasca-nasionalisme, PascaIndonesia; Meneropong Masa Depan Nasionalisme Indonesia*. Kumpulan tulisan yang di muat dalam buku "Meneropong Indonesia 2020 Pemikiran dan Masalah Kebijakan". Soegeng Sarjadi Syndicated. Jakarta. hlm. 11-12

<sup>20</sup> Soejatmoko, *op. cit.* Hlm. 28

hendaknya semakin dikikis. Fenomena pecahnya Uni Soviet dan Yugoslavia mengajarkan kepada kita bahwa bangunan keindonesiaan akan rapuh jika diisi oleh manusia-manusia yang terkekang dan tertindas di bawah represi ideologis dan mobilisasi politik. *Kedua*, Menjaga masa depan Indonesia tiada lain menjaga dan mengawal keadilan dan pemerataan. Hal ini terakumulasi dengan kegagalan konkritisasi negara-negara komunis dalam proyek keadilan sosial dan pemerataan terbukti dengan sangat efektif dalam meruntuhkan bangunan negara-bangsa. *Ketiga*, Kebutuhan untuk mengelola *civil society* secara proporsional dengan "rumus kendali"; pemberian otonomi secara proporsional dan pemberian kontrol secara arif. Artinya proses pengelolaan *civil society* harus dikelola secara baik agar tidak terjadi benturan keras dengan negara sehingga berakibat pada runtuhnya bangunan keindonesiaan. *Keempat*, menjaga masa depan keindonesiaan yang berarti menjaga agar primordialisme tidak semakin mengental yang nantinya cenderung bergerak pada ranah sentrifugal. *Kelima*, masa depan keindonesiaan juga akan dapat dipelihara manakala kita mampu dalam mengatasi krisis kepemimpinan. Dalam konteks kekinian mengagendakan transisi politik kepemimpinan secara damai merupakan kebutuhan yang sangat signifikan. Kelima hal ini merupakan salah satu upaya dalam menjawab skenario John Naisbit melalui *Global Paradox* (1994) yang meramalkan bahwa konsep negara bangsa, perbatasan dan pemerintah pusat akan menjadi usang dimasa depan.

Wajah nasionalisme Indonesia masa depan selayaknya berpijak pada nasionalisme anti kekerasan, penindasan, eksploitasi dan pelanggaran HAM. Prosesi penyemaian nalar nasionalisme yang

produktif dan akumulatif dalam merespon isu-isu proyek "penindasan" dalam skala lokal dan global harus menjadi perhatian bersama, karena sekarang Indonesia sudah berada pada nasionalisme gelombang ketiga yang berarti duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sejati. Upaya *transfer of value system* dari kebudayaan yang ekspresif menuju kebudayaan yang progresif dimana tingkat melek huruf yang tinggi, penguasaan ilmu dan teknologi<sup>21</sup> serta penghargaan yang tulus terhadap demokrasi akan semakin mengakselerasi proses pendidikan masyarakat warga yang kreatif dan inovatif dalam pelbagai macam sektor kehidupan.

Antisipasi kesadaran nasionalisme masyarakat Indonesia yang hanya berkuat pada ranah kognitif nantinya dapat menuai penyakit kanker konflik yang mengakar, sehingga dikemudian hari akan sukar mencari obat penawarnya. Pemahaman nasionalisme yang pada tataran kulit lama kelamaan akan bergerak pada ranah kesadaran semu tanpa isi dan "bodoh", tapi kalau kemudian kesadaran nasionalisme masyarakat itu dibangun pada bangunan integralistik, yaitu menyatukan kesadaran kognitif dan tindakan, maka kesadaran akan melahirkan sosok manusia Indonesia yang santun, dewasa, bertanggung jawab dan memiliki nilai etik moral yang dapat dipertanggung jawabkan.

### Nasionalisme humanis dan korupsi

Dalam pandangan Soekarno kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia dan masyarakat dunia ketiga, tidak hanya

---

<sup>21</sup> Sutan Takdir Alisjahbana, 1991. Kerja Lebih Keras Raih yang Terdepan, *Prisma* No. 2 Tahun XX Februari. LP3ES. Jakarta. hlm. 64

melahirkan pemikiran humanisme universal. Kedua etos itu melahirkan gagasan nasionalisme humanis yang merupakan kritik terhadap nasionalisme barat yang agresif, dan didorong oleh etos kapitalisme yang kemudian melahirkan imperialisme modern. Imperialisme inilah, yang diyakini Bung Karno menjadi masalah sulitnya negara dunia ketiga keluar dari kemelut kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>22</sup> Tesis ini semakin mengukuhkan bahwa nasionalisme yang kreatif dan cerdas harus mampu menghadapi pelbagai macam masalah kontemporer.

Nasionalisme humanis dibangun atas prinsip, setiap bangsa mampu memberikan sumbangan dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, serta untuk pengembangan nilai-nilai humanisme sesuai dengan karakteristik dan sifat-sifat bangsa itu. Artinya tidak hanya paham, kebebasan, keadilan dan kesetaraan, tetapi paham toleransi adalah hal yang perlu mendapat perhatian dalam tata pergaulan internasional.<sup>23</sup> Nasionalisme yang seperti ini merupakan salah satu alternatif strategis dalam menggiring perdamaian dunia dengan tetap memegang teguh prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu semangat ini juga harus dibumikan di Indonesia, sehingga fenomena korupsi, kekerasan dan praktik-praktik yang tidak rasional dan humanis dapat diminimalisir dan dicegah.

Penyakit sosial yang terjangkau sekarang ini semakin hari semakin subur adalah penyakit korupsi yang merupakan salah satu fenomena mutakhir dalam konteks Indonesia. Penobatan dari dunia Internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang masuk tiga besar terkorup di dunia semakin menegaskan bagaimana rapuhnya nasionalisme sejati dalam menghalau penyemaian penyakit yang

sudah beranak pinak ini menjadi tidak jelas dan cenderung abu-abu. Piranti hukum yang diharapkan dapat menegakkan hukum ternyata masuk dalam lingkaran mafia peradilan yang berorientasi pada "materi" ketimbang pada keadilan hukum. Politisi yang ulung mampu mengelabui masyarakat dengan melakukan perselingkuhan dengan para pengusaha dan beberapa aktor pemerintah dalam menggerus hak rakyat dan kekayaan negara, dan masih segudang masalah yang tak kunjung usai.

Lahirnya pelopor penegakan hukum seperti, KPK dan penegak hukum sebagai pelopor kebangkitan nasional tampaknya banyak mendapat kendala hal ini disebabkan oleh. *Pertama*, korupsi sudah merasuk kesegala lini dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi pola pikir dan berprilaku, baik itu para ranah individual dan birokrasi pemerintahan. *Kedua*, budaya mengabaikan yang kecil, termarginalkan. Meminjam bahasa Hobbes, *homo homini lupus*, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Artinya kalangan elit kerap kali melakukan korupsi terhadap hak-hak masyarakat yang kecil sehingga praktik eksploitasi terus berlangsung. *Ketiga*, dunia pendidikan kita tidak memiliki filosofi pendidikan dan kehilangan jiwa edukasional yang menyemai nalar bebas korupsi.<sup>24</sup> Pakar pendidikan J. Drost, S.J. selalu menampik bahwa tujuan utama sekolah adalah melakukan pendidikan. Artinya yang ingin diperjelas disini, bahwa antara pengajaran dan pendidikan tidaklah sama.

---

<sup>22</sup> Tadjuddin Noer Effendi; Mei, 2001. Menggagas Nasionalisme Soekarno, *Makalah Seminar sehari peringatan 100 hari Bung Karno*. Universitas Gadjah Mada

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Andreas Yumarma, Nasionalisme dan Pemberantasan Korupsi, *Kompas*. Selasa, 17 Mei 2005



Akan tetapi bagi banyak orang mencampuraduk dan menganggap sama. Ini adalah kerancuannya. Tugas utama dan terutama sekolah adalah pengajaran, bukan pendidikan. Tugas pengajaran yang dilakukan sekolah dalam proses belajar-mengajar adalah membantu anak mengembangkan kemampuan intelektual yang dimilikinya.<sup>25</sup> Sedangkan pendidikan yang dimaksudkan menanamkan nilai-nilai kedalam budi anak-anak remaja, dan sebenarnya hal tersebut adalah tugas utama orang tua, sekolah hanya membantu sedangkan orang tua dan keluarga juga ikut serta dalam mengambil peran dalam ikut serta penyemaian virus anti korupsi. Jika hal ini terbangun akan terjadi sinergisitas yang saling mengisi antara keluarga, sekolah dan masyarakat dalam upaya penyemaian anti-korupsi. Jika lini terkecil dari subsistem sosial yang terkecil sudah terbangun pemahanan dan kesadaran anti-korupsi niscaya akan terakumulasi masyarakat yang santun.

Berkembangnya semangat nasional harus dimanfaatkan dalam arti sebenarnya memerlukan tindakan radikal seperti, amputasi penyakit korupsi yang tidak bisa ditunda-tunda, pendidikan yang didirigeni pakar pendidikan sendiri, sehingga arah

pendidikan tidak dikebiri kepentingan politik dan ekonomi. Ketidakberdayaan pendidikan para pakarnya tidak hanya terekspresikan dengan para mahasiswa yang bunuh diri tetapi sampai mental kelelahan mental pendidik.<sup>26</sup> Semangat individualisme dan ego sektoral telah menggiring otonomi daerah, pilkada dan korupsi yang semakin telanjang di seluruh lapisan masyarakat hingga sampai ke lembaga terhormat menjadi pil pahit bagi nasionalisme yang mempromosikan senasib dan sepenanggungan.

### Penutup

Ke depan untuk menjaga masa depan keindonesiaan harus pula menjaga agar primordialisme tidak semakin mengental, mengeras dan menjadi ledakan sosial berbentuk gerakan sentrifugal, maka bangunan nasionalisme yang cerdas, elegan dan humanis harus menjadi pertimbangan dalam mencari resolusi konflik di Indonesia. Upaya merajut emosi nasionalisme yang kontekstual dan mampu menjadi mesin pendulum perubahan masyarakat lebih demokratis, egaliter dan humanis harus menjadi paradigma nasionalime masa depan. ●

---

<sup>25</sup> Sabiqul Khair Syarif, Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, *Jawa Pos*, 21 Maret 2005

<sup>26</sup> Andreas Yumarma, *op. cit*

## Topik: Manajemen Negara dan Nasionalisme

### Daftar Pustaka

- Dwipayana, AAGN, 2005. *Demokrasi*. Materi kuliah Teori Politik Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah. UGM.
- Budiman, Arief, 2002. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia.
- Diamond, Larry, 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press.
- Sudiarja. *Indonesia: Negara sudah lahir, Bangsa belum terbentuk?*, 2001 *Basis* No.03-04. Jogjakarta.
- Amir, Sulfikar, *Epistemologi Nasionalisme*, Kompas, 03 November 2004
- Alisjahbana, Sutan Takdir, 1991. Kerja lebih keras raih yang terdepan, *Prisma* No. 2 Tahun XX Februari. LP3ES. Jakarta.
- Effendi, Tadjuddin Noer, Mei, 2001. *Menggagas Nasionalisme Soekarno*, Makalah Seminar sehari peringatan 100 hari Bung Karno. Universitas Gadjah Mada
- Fatah, Eep Saifullah, 1999. *Membangun Oposisi*. Bandung: Rosda.
- Syarif, Sabiqul Khair, Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, *Jawa Pos* 21 Maret 2005
- Soedjatmoko, Nasionalisme sebagai Prospek Pelajar, Jakarta: *Prisma*, No.2/Februari Tahun 1991.
- Nurchahyo, Y. Ari. 2004. *Pascanasionalisme, PascaIndonesia; Meneropong Masa Depan Nasionalisme Indonesia*. Kumpulan tulisan yang di muat dalam buku "Meneropong Indonesia 2020 Pemikiran dan Masalah Kebijakan". Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicated.

